

PAPER NAME

Disrupsi Pemerintahan 1 74-77-16-20.pdf

AUTHOR

Arizka

WORD COUNT

962 Words

CHARACTER COUNT

6658 Characters

PAGE COUNT

5 Pages

FILE SIZE

192.4KB

SUBMISSION DATE

Apr 5, 2023 3:08 PM GMT+7

REPORT DATE

Apr 5, 2023 3:08 PM GMT+7

● 4% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 2% Internet database
- Crossref database
- 2% Publications database
- Crossref Posted Content database

● Excluded from Similarity Report

- Submitted Works database
- Quoted material
- Bibliographic material
- Cited material

Zona Integritas dan Peringatan Dini Kepala Daerah

ARIZKA WARGANAGERA/Media Lampost.co/2020

Seorang kawan berkabar dan bertanya soal Lampung. Beliau sangat heran dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir kepala daerah di Lampung banyak terkena OTT (operasi tangkap tangan-pen). Teman tersebut, berujar "sungguh mengherankan Arizka, Lampung sejauh yang saya tahu termasuk provinsi miskin di Indonesia bahkan masuk dalam 3 besar miskin di Sumatera, beliau berujar apalagi yang di korupsi atau motif apa yang membuat OTT subur di Lampung?"

Saya mencoba menjelaskan kepada beliau, bahwa ini semua konsekuensi dari *high cost politics* atau politik berbiaya tinggi yang massif dimulainya sejak Pilkada 2005 yang lalu. Beliau lantas bertanya kembali, "apa motifnya untuk Lampung? Saya kembali memberikan penjelasan bahwa konsekuensi dari *business driven politics* atau politik yang berteraskan bisnis sememangnya selalu melahirkan para politisi yang berpijak pada penguasaan logistik untuk menang di Pilkada.

Dan umumnya tipikal politisi model ini selalu percaya untuk menang pilkada di perlukan kolaborasi antar *agroup of business* dan politisi lokal dirajut dalam bingkai hubungan yang saling menguntungkan (*mutual relations*).

Pada bagian lain, politisi yang seperti ini selalu percaya kemenangan Pilkada dapat diperoleh jika kita menguasai *logistic* lebih dari kandidat yang lain, padahal argument seperti ini seharusnya dikoreksi.

Kemenangan Pilkada itu ditentukan dengan banyak faktor, antara lain jaringan politik, uang, sentiment etnis vis a vis agama, personalitas calon dan lain-lainya.

Jika dirumuskan kemenangan pilkada tersebut seperti layaknya sebuah pemodelan, $x = y_1 + y_2 + y_3 + y_4$ dst. Semua faktor yang tersebut diatas adalah pelengkap dan saling melengkapi, soal mana faktor yang lebih dominan itu sangat tergantung dengan aspek demografis dan pola perilaku pemilih

Di setiap tempat, sebagai contoh perilaku pemilih kota Metro tentunya berbedadengan kota Bandar Lampung.

Pada bagian, financial berlebih akan tetap tidak didukung dengan jejaring politik yang memadai, akan sama saja dengan logika membeligaram dan menggarami air laut.

Akibat politik berbiaya tinggimenyebabkan baik elit maupun pemilih berpontesi saling bertukar, menukar suara dengan sejumlah uang. Pada point lanjutan, relasi itu pun kemudian berkembang tidak hanya antara calon KDH dan pemilih akan tetapi juga hubungan antara politisi lokal dan pemilik modal.

Narasi seperti itulah sekiranya lingkaran setan atau *vicious cycle* yang terjadi antar semua pihak yang tetlibat dalam proses pilkada.

Ada beberapa hal yang menjadipembeda antara Politik Lampung dan beberapa daerah lainnya seperti yang saya tulis dalam disertasi Doktor saya di University of Leeds, Inggris. *Whilst Lampung's politics appear to have been moving toward a strong business orientation even as ethnic sentiment continues to play a major role especially in some Javanese majority areas, in other parts of Indonesia such as Banten, Central Kalimantan and South Sulawesi, kinship politics still dominate (Aspinall and As' ad,*

2016; Buehler, 2013; Hamid, 2014). In Bali, rivalry among aristocratic families still influences daily local politics (MacRae and Putra, 2008). Lampung menjadi provinsi yang bergerak menjadi Provinsi yang politiknya cenderung berorientasi *business driven* walau di beberapa daerah sentimenetnis tetap dominan.

Sementara itu di provinsi lain seperti Banten, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Selatan, *pattern* lama masih dominatif, politik kinship atau politik kekerabatan.

Perbedaan Lampung dengan beberapa provinsi tersebut diatas, Banten, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan dan Bali menjadi *early warning* buat Lampung, daerah ini sangat rawan untuk terjadinya korupsi politik.

Politik berbiaya tinggi di Lampung menjadikan para politisi tersandera untuk memainkan pundi uang negara yang secara kebetulan para kepala daerah mempunyai akses kebijakan terhadap APBD misalkan. Pola berbagi proyek juga merupakan bagian dari narasi bagaimana uang memengaruhi politik.

Dan ini terbukti dalam banyak kasus OTT, polanya hampir sama, terkait dugaan penyyuapan terhadap kepala daerah untuk sejumlah proyek.

Bagaimana Pesan buat KDH

Sekalilagi, menghindari korupsi politik menjadi bagian dari bagian kemampuan kepala daerah untuk membagi orientasi dirinya sebagai politisi dan pengembananamanat rakyat.

Sebagai politisi yang bermain pada arena *high cost politics*, tuntutan patronase politik berbiaya tinggi tentunya menjadi hal yang sulit dihindari dari akan tetapi peluang itu ada.

Tantangan terbesar yang akan dihadapi oleh kepala daerah bersumbu pada masalah umum di Indonesia yaitu: mereduksi kemiskinan, meningkatkan mutu pendidikan termasuk didalamnya akses pendidikan untuk semua kalangan dan buruknya layanan kesehatan, termasuk ketersediaan sarana

prasarana kesehatan. Ketigahal ini seharusnya menjadi prioritas pembangunan.

Pada bagian lain, sebagai pengemban amanah rakyat, idealnya KDH harus mempunyai blue print pembangunan yang tegas dan jelas, tegas terhadap tindakan koruptif.

Guna merespon halitu, saya pikir KDH harus mempertimbangkan nomen klaturbirokrasi yang adaptif dengan perkembangan global. Prilaku koruptif yang berujung padakebijakan KDH bisa diantisipasi dengan meminimalisir kontak langsung *person to person* seperti yang belaku lazim di negara-negara maju.

Implementasie- *government* termasuk didalamnya *e-budgeting* dan *e-procurementp* ada satu sisidibuat untuk meminimalisir kontak langsung tersebut, akan tetapi kita juga meyakini bahwa alat tersebut tetap lahalat yang tetap memungkinkan dimanipulasi sistem-nya.

Pada akhirnya, moral individual menjadi hal pokok terjadinya reformasi publik dan menjauhkan KDH dari prilaku koruptif. Sejarah Romawi memberikan pesan bahwa jatuh dan mundurnya peradaban romawi disebabkan prilaku elit yang koruptif dan masyarakatnya yang melanggar etika kepatutan berperilak usebagai manusia.

Biodata Penulis



ARIZKA WARGANEGARA, Ph.D. lahir di Metro 20 Juni 1981 mengabdikan sebagai Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung, alumnus Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung tahun 2003 dan Master of Arts dalam bidang Ilmu Politik Universitas Kebangsaan Malaysia tahun 2005. Menyelesaikan Doctor of Philosophy dalam bidang Political Geography di University of Leeds, Inggris Raya tahun 2019.

Pada tahun 2002 penulis tercatat sebagai Mahasiswa Berprestasi Utama I Universitas Lampung dan Mahasiswa Berprestasi Tingkat Nasional. Kolumnis Jakarta Globe dan Media Indonesia ini pernah menjabat sebagai ² **Direktur Lembaga Kajian Politik, Publik dan Demokrasi KAHMI wilayah Lampung** dan aktif sebagai Pengurus Cabang Istimewa Muhammadiyah (PCIM) Inggris Raya.

³ Pernah menjabat sebagai Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Muhammadiyah Lampung. Pada tahun 2015, bersama beberapa pelajar Indonesia yang sedang studi di Inggris Raya mendirikan Lingkar Studi Cendekia, United Kingdom (LSC-UK), sebuah lembaga think tank yang bertujuan memberikan kontribusi pemikiran bagi peradaban Indonesia.

Beberapa paper dipresentasikan pada Konferensi ASEASUK SOAS University of London tahun 2016, ASEASUK Seminar di University of York tahun 2018, Sustain Kyoto Conference Jepang tahun 2013 dan beberapa konferensi di Universitas Kebangsaan Malaysia.

● 4% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 2% Internet database
- 2% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Arizka Warganegara, Paul Waley. "The political legacies of transmigrati...	2%
	Crossref	
2	m.rimanews.com	<1%
	Internet	
3	old-prasetya.ub.ac.id	<1%
	Internet	